

ISLAM DI IRAN: Dari Era Umar ibn al-Khattāb Hingga Ahmadinejad

Asmullah
UIN Alauddin Makassar

ABSTRACT: *The main problem in this paper is trying to study or elaborate in depth about Islam in Iran from the era of Umar ibn Khattāb to Ahmadinejad. To answer this problem, the author tries to trace, explore and analyze several books, books, opinions of historians and various related writings in order to obtain a deeper and more accurate understanding. The results of the study of this paper show that during the leadership of Caliph Umar ibn al-Khattab (634-644 AD), the territory of the Persian Empire (Iran) began to be conquered in various battles. From 634 AD to 820 AD, the territory of Persia (Iran) was successively under the rule of the Khulafa' al-Rasyidin, the Umayyad dynasty, and the Abbasid dynasty.*

If one contemplates or examines the long span of Islamic history in Persia (Iran), the Persians (Iran) have played and contributed quite a bit, both in terms of the spread of Islamic teachings to the Eastern parts of the world, as well as in terms of the development of Islamic culture and civilization. . The spread and expansion of Islamic territory to the eastern world cannot be separated from the role of Iran which is at the gate of the eastern world. This can be seen from the entry of Islam into Persia, Armenia, Azerbaijan, Turkistan, Turkmenistan, Pakistan, Afghanistan, India, China, Malaysia and Indonesia. Persia (Iran) as an Islamic country which has privileges from various interesting aspects to study and elaborate on even when Ahmadinejad was elected as president he was one of those people who lived a simple life. He is also known as a conservative figure who is very loyal to the values of the Islamic Revolution in Iran.

Keywords: *Islam, Iran, History, Umar Ibn al-Khattab, Ahmadinejad*

I. PENDAHULUAN

Persoalan hubungan antara agama (*al-din*) dan negara (*al-Daulah*) merupakan salah satu subyek yang selalu hangat diperdebatkan di kalangan para pemikir Islam dari dahulu hingga sekarang. Berbagai eksperimen telah dilakukan pada beberapa negara untuk menyelaraskan antara ajaran Islam dengan konsep dan kultur politik masyarakat muslim. Namun, karena tingkat penetrasi Islam ke dalam negara dan politik berbeda-beda, maka timbul kesulitan untuk menentukan sebuah negara yang menjadi pola dasar (*prototype*) negara Islam, seperti Arab Saudi, Pakistan, atau Iran.¹

Iran adalah sebuah negara Timur Tengah yang terletak di Asia Barat Daya. Meski di dalam negeri ini telah dikenal sebagai Iran sejak zaman kuno, hingga tahun 1935 Iran

¹Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post Modernisme* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996), h. 1.

masih dipanggil Persia di Dunia Barat. Pada tahun 1959, Mohammad Reza Shah Pahlavi mengumumkan bahwa kedua istilah tersebut boleh digunakan. Nama Iran adalah kognat perkataan "Arya" yang berarti "Tanah Bangsa Arya".²

Iran adalah sebuah negara Republik Islam yang jumlah penduduknya pada tahun 2006 mencapai 70.000.000.³ Persentase warga Iran yang beragama Islam adalah 98 %, Sunni 8 %, sedang sisanya 92 % adalah pengikut Syi'ah Dua Belas Imam (dari paham ushuliyah, dan terdapat sedikit paham Akhbariyah di Khuzistan).⁴ Penganut Kristen Armanean dan Kristen Chaldean diperkirakan sekitar 1 %, juga terdapat sejumlah kecil penganut agama Yahudi. Selain itu terdapat 30.000 penganut Zoroastria, 50.000 penganut Bahais, beberapa kelompok kecil penganut Ali Ilahis, Babis, Syaikhis, dan Isma'iliyah. Warga Iran mayoritas adalah etnis Persia (sekitar 63 %), namun 26 % warganya berbahasa dengan bahasa Turki (yakni, Azeris, Baluchis, Qadyqai, Turkoman, dan lain-lain. Terdapat sekitar 2.000.000 suku Kurdi yang tinggal di Iran, terdapat minoritar keturunan Arab yang tinggal di Khuzistan (yang oleh orang Irak, mereka disebut "Arabistan").⁵

Iran merupakan negara pegunungan yang terletak di daerah Timur Tengah di belahan utara bumi, antara 25° dan 40° garis lintang serta 44° dan 63° garis bujur.⁶ Dari segi geopolitik, negara ini berada di suatu lokasi yang sangat strategis. Di sebelah barat laut, berbatasan dengan Azerbaijan (500 km) dan Armenia (35 km). Di sebelah utara, berbatasan dengan Laut Kaspia. Di sebelah timur laut, berbatasan dengan Turkmenistan (1000 km). Di sebelah timur, berbatasan dengan Pakistan (909 km) dan Afghanistan (936 km). Di sebelah barat, berbatasan dengan Turki (500 km) dan Irak (1.458 km), dan perairan Teluk Persia dan Teluk Oman di Selatan. Pada tahun 1979, sebuah Revolusi Iran yang dipimpin Ayatullah Khomeini mendirikan sebuah Republik Islam teokrasi sehingga nama lengkap Iran saat ini adalah Republik Islam Iran.

Republik Islam Iran (*Jomburi-ye Eslami-ye Iran*) adalah sebuah negara yang dianggap unik dalam teori politik Islam. Melalui gerakan revolusi yang dipimpin oleh Khomeini, berhasil menumbangkan sistem monarki dan mendirikan negara republik. Dengan konsep politik *velayat-e faqih* (*wilayah al-faqih*), Khomeini berusaha

²John Eksposite, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern* (Cet. II; Bandung: Mizan, 2002), h. 329.

³"Daftar Tokoh Iran". Wikipedia bahasa Indonesia. <https://id.m.wikipedia.org> (06 September 2022)

⁴Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam: Ringkas* (Cet. III; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 172.

⁵Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam: Ringkas*, h. 172.

⁶Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid. II (Cet. IX; Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 241.

menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sesuai dengan mazhab Syi'ah Itsnā 'Asyariyah.

Bagi masyarakat dunia Islam, Revolusi Iran merupakan kejadian yang secara simbolis penting. Revolusi Iran memperlihatkan bahwa rezim sekuler yang dipengaruhi oleh Barat dapat ditumbangkan oleh kekuatan oposisi yang diorganisir oleh pembaru Islam.

Bagi kaum muslimin yang menginginkan pembaruan dan ingin lepas dari dominasi Barat, baik di Iran maupun di Negara-negara lain, revolusi Iran merupakan kejadian yang dapat memberikan inspirasi dan kekuatan baru. Sedangkan bagi barat revolusi Iran adalah suatu hal yang sangat mengusik dan sangat memalukan, betapa tidak rezim yang ditunjang oleh kekuatan militer yang dikatakan terkuat di Teluk Persia dan dibantu oleh Negara adi daya Amerika Serikat, dapat dikalahkan oleh kekuatan revolusi yang hanya dikomandoi oleh seorang yang sudah berumur tua yaitu seorang Ayatullah Ruhullah Khomeini. Akhir dari revolusi ini menumbangkan pemerintahan monarki yang telah lama ada di Iran dan menggantikannya dengan pemerintahan teokrasi.

Dengan tampilnya kekuatan dan politik islam sebagai suatu ideologi yang komprehensif cukup mengejutkan dan mengguncangkan bagi pihak Barat serta Uni Sovyet yang dianggap sebagai musuh-musuh Islam oleh kalangan Islam militan. Dengan demikian, kecenderungan gerakan kebangkitan Islam militan yang anti Barat terkadang menampilkan tindakan-tindakan yang keras terhadap bangsa-bangsa Barat, sehingga Islam militan yang secara populer dikenal sebagai "Islam Fundamentalis" dianggap membahayakan kepentingan-kepentingan Barat di dunia Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi inti pembahasan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah masuknya Islam di Iran ?
2. Bagaimana pergolakan politik di Iran dari Monarki ke Republik ?
3. Bagaimana transformasi sosial-budaya di Iran Pascarevolusi ?

II. KAJIAN TEORI

A. Asal-usul bangsa Iran

Sejak zaman kuno, Iran lebih dikenal dengan sebutan Persia (*Parsa*; Yunani *Persis*), yang merujuk ke Fars, sebuah daerah yang berada di bagian selatan Iran.⁷ sejak tahun 1935 M, pada masa pemerintahan Raja Reza Khan Shah (pendiri Dinasti Pahlevi), sebutan Persia diganti dengan Iran (tanah bangsa Arya atau bangsa mulia), Nama ini pernah dipakai oleh nenek moyang bangsa Iran bagi Dataran Tinggi Iran yang dikuasai

⁷John L. Espositon (ed), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, diterjemahkan oleh Eva YN, et all., *Ensiklopedi-Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid II (Cet. II; Bandung: Mizan, 2002), h. 329.

mereka pada sekitar tahun 1700 SM. Pada masa kekuasaan Darius (maha raja Iran tempo dulu), nama ini juga pernah digunakan bagi negeri kekuasaannya.⁸

Diperkirakan, sebelum tahun 5000 SM, sudah terdapat bangsa yang menetap di Iran. Namun, tidak diketahui secara pasti dari mana mereka berasal. Sekitar tahun 2000 SM, bangsa Arya yang merupakan ras Indo-Eropa, telah menetap di Fars, wilayah bagian selatan Iran, dan karenanya mereka disebut suku Fars. Pada tahun 1000 SM, datang pula suku Media yang juga berasal bangsa Arya dan menetap di bagian utara wilayah Iran.⁹

Pada tahun 700 SM, suku Media berhasil menguasai beberapa wilayah sekitarnya, termasuk wilayah yang dikuasai oleh suku Fars. Mereka berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang luas, dengan Ecbatana sebagai ibu kotanya. Pada tahun 553 SM, kerajaan tersebut dapat dijatuhkan oleh Cyrus Agung dan mendirikan Dinas Akhemenida. Kerajaan ini mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Darius I (521-485 SM). Wilayah kekuasaannya merentang dari sungai Indus hingga ke bagian selatan Rusia, bahkan sempat menguasai Yunani, Turki, Cyprus, Mesir, dan Libya. Dinasti Akhemenida runtuh pada tahun 331 SM, karena diserbu oleh Alexander Agung (356-323 SM). Setelah itu wilayah Persia berturut-turut dikuasai oleh Dinasti Seleukida, Parthia, dan Sasanid.¹⁰

B. Sejarah Masuk dan Berkuasanya Kekhalifahan Islam di Iran

Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar ibn al-khattab (634-644 M), wilayah Kerajaan Persia mulai ditaklukkan dalam berbagai pertempuran. Pada tahun 634 M, perang Namariq, Jisr, dan Buwaih mengakibatkan beberapa wilayah Persia jatuh ke tangan kaum muslimin. Setelah itu, disusul perang Qadisiyah pada tahun 635 M, Madain pada tahun 637 M, Ashthahar pada tahun 638 M, dan Nahawand pada tahun 641 M. Pada perang yang disebutkan terakhir inilah, seluruh wilayah kerajaan Persia d bawah kepemimpinan Raja Yazdajird, jatuh di tangan kaum muslimin.¹¹ Sejak saat itu, masyarakat Persia yang semula menganut agama Zoroaster, beralih menganut agama Islam. Akhirnya, kebudayaan Islam pun berkembang di wilayah itu.

Sejak tahun 634 M hingga tahun 820 M, wilayah Persia berturut-turut berada di bawah kekuasaan Khulafa' al-Rasyidin, Dinasti Umayyah, dan Dinasti Abbasiyah. Namun, berdasarkan ucapan terima kasih dari khalifah al-Ma'mun kepada panglima perangnya yang berjasa memulihkan kekuasaannya, Thahir ibn Husain, memberi

⁸Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid. II (Cet. IX; Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 241.

⁹John L. Espositon (ed), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, diterjemahkan oleh Eva YN, et all., *Ensiklopedi-Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid II, h. 241-242.

¹⁰John L. Espositon (ed), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, diterjemahkan oleh Eva YN, et all., *Ensiklopedi-Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid II, h. 242.

¹¹Ahmad al-'Usairiy, *al-Tarikh al-Islamiy*, diterjemahkan oleh Samson Rahman dengan judul *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX* (Cet. IV; Jakarta: Akbar Eka Saran, 2006), h. 158-162.

wewenang kepadanya untuk mendirikan dinasti Thahiriyah (820-872 M) yang berpusat di Khurasan. Setelah itu, bermunculan dinasti-dinasti tersebut, antara lain, Dinasti Samanidiyah (892-999 M), Dinasti Gaznawiyah (999-1037 M), dan Dinasti Saljukiyah (1037-1157 M).¹²

Setelah sekitar tiga abad lamanya dikuasai oleh bangsa mongol,¹³ muncul Dinasti Safawiyah (1502-1735 M) yang berusaha menyatukan kembali wilayah Persia yang terpecah-pecah. Nama Safawiyah diambil dari nama pendiri Tarekat safawiyah, yaitu Syekh Safiuddin Ardabeli dari Ardabel (Azerbaijan).¹⁴ Isma'il ibn Haidar, penguasa pertama Dinasti Safawiyah adalah orang yang sehari-harinya menggunakan bahasa Turki, tetapi dia mempercayakan administrasinya kepada para birokrat yang berbahasa Parsi. Ibu kota kerajaan di tempatkan di Tabriz, Azerbaijan¹⁵ berbeda dengan dinasti-dinasti Islam yang berkuasa sebelumnya, dinasti ini menetapkan Syi'ah Itsna 'Asyariyah (Syi'ah Imam Dua Belas) sebagai agama resmi kerajaan. Penguasa mendatangkan ahli-ahli agama Syi'ah dari negara-negara Arab (Libanon dan Bahrain) untuk mendoktrin orang-orang Iran. Bukan hanya itu, Isma'il memerintahkan kepada para khatib yang menyampaikan khutbah pada hari Jum'at, agar secara terbuka mengutuk tiga khalifah Sunni pertama (Abu Bakr al-Shiddiq, Umar ibn al-Khattab, dan Usman ibn Affan) yang telah berebut kedudukan Ali ibn Abi Thalib yang lebih berhak.¹⁶

Pada abad ke-18, Dinasti Safawiyah tumbang akibat invasi bangsa Afganistan yang berusaha memaksakan kembali faham Sunni kepada orang-orang Iran. Para ulama Syi'ah yang terkemuka lari ke Irak, yang waktu itu merupakan bagian dari Dinasti Usmani. Mereka tinggal di kota Najaf dan karbal, yang dibangun di sekeliling kuburan Ali dan husain. Meski pemerintahan bangsa Afganistan hanya berlangsung selama delapan tahun, namun para mujtahid senior Syi'ah tetap tinggal di kota tersebut hingga sekarang.¹⁷

¹²Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid. II (Cet. IX; Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 241.

¹³Pada era ini, terjadi malapetaka dan bencana bagi masyarakat Persia. Penduduk kota dan kampung dimusnahkan secara sistematis, sehingga hampir seluruh wilayah menjadi tidak berpenduduk. Bangsa mongol menjadikan penduduk yang tersisa sebagai budak dan membebani mereka dengan pajak yang tinggi, sehingga menyita seluruh kekayaan mereka. Lihat Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, diterjemahkan oleh Ghifron A. Ma'adi dengan judul *Sejarah Sosial Umat Islam: Bagian I & II* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 428.

¹⁴Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, diterjemahkan oleh Ghifron A. Ma'adi dengan judul *Sejarah Sosial Umat Islam: Bagian I & II*, h. 242-243.

¹⁵Ahmad al-'Usairiy, *al-Tarikh al-Islamiy*, diterjemahkan oleh Samson Rahman dengan judul *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX* (Cet. IV; Jakarta: Akbar Eka Saran, 2006), h. 438.

¹⁶Edward Mortimer, *Faith and Power: The Politics of Islam*, diterjemahkan oleh Enna Hadi dan Rahmani Astuti dengan judul *Islam dan kekuasaan* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1984), h. 280-281.

¹⁷Edward Mortimer, *Faith and Power: The Politics of Islam*, diterjemahkan oleh Enna Hadi dan Rahmani Astuti dengan judul *Islam dan kekuasaan* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1984), h. 285-286.

Apabila direnungkan atau dikaji dari rentang sejarah Islam yang cukup panjang tersebut, maka bangsa Persia memiliki peranan dan andil yang cukup besar, baik dari segi penyebaran ajaran Islam ke belahan dunia Timur, maupun dari segi pengembangan budaya dan peradaban Islam.

Penyebaran dan perluasan wilayah Islam ke Dunia timur, tidak dapat dilepaskan dari peranan Iran yang berada di pintu gerbang wilayah dunia Timur. Hal ini dapat dilihat dari masuknya islam ke Persia, Armenia, Azerbaijan, Turkistan, Turkmenistan, Pakistan, Afganistan, India, Cina, Malaysia, dan Indonesia.¹⁸

Ditinjau dalam bidang IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi), maka bangsa Persia memiliki beberapa tokoh yang terkenal, di antaranya al-Biruni, Muhammad Musa al-Khawarizmi, Nasiruddin al-Tusi, Abu Bakr al-Juwaini, Abbas Majuzi al-Ahwazi, dan Zainal Abidin Isma'il Gorgani. Dalam bidang filsafat, terkenal beberapa nama, seperti al-Razi, al-Biruni, Ibn Maskawaih, al-Farabi, Ibn Sina, Abu Sulaiman al-Mantiqi, al-Tusi, Syadruddin al-Syirazi, Murtadha Mutahhari dan Ali Syariati. Dalam bidang tasawuf, terkenal nama Abu Hamid al-Gazali, Abu Yazid al-Bustami, Husain ibn Mansur al-Hallaj, Abd al-Karim al-Jili, Abd al-Qadir al-Jailani, dan Muhammad Baharuddin al-Naqsyabandi. Dalam bidang teologi, terkenal nama al-Jubbai, al-Maturidi, al-Bazdawi, dan al-Baqillani. Dalam bidang hadis, terkenal nama al-Bukhari, Muslim, al-Turmuzi, dan ibn Majah dari kalangan ulama sunni, sementara ahli hadis dalam kalangan syiah adalah Muhammad ibn Ya'kub Kulaini (kitab al-Kafi), Syeikh Tusi dengan kitab Tahdzibul Ahkam. Dalam bidang fikih, terdapat nama Abu Hanifah, Abu Dawud al-Zhahiri, dan al-Thabari. Dalam bidang sastra, muncul nama al-Firdausi, Umar Khayam, Nasir Kasrow, Jalaluddin al-Rumi, dan Muhammad Iqbal.¹⁹ Dalam bidang Nahu adalah Abu Aswad al-Duwali, Sibawaih dan Alfiah ibn Malik. Dalam bidang Sosiologi Besar dan Sejarahwan adalah Ibn Khaldun. Dalam bidang Kimiawan Besar adalah al-Razi. Sementara dalam bidang Tafsir adalah Tabatabai, dan seterusnya. Dengan demikian, bangsa Persia memiliki beberapa tokoh yang hebat dan menjadi rujukan bagi generasi selanjutnya.

C. Pergolakan Politik di Iran dari Monarki ke Republik

Pada tahun 1779-1925 M, wilayah Persia berada di bawah kekuasaan Dinasti Qajariah. Selama dinasti ini berkuasa, wilayah persia melewati periode anarkis dan pergolakan kesukuan untuk merebut kekuasaan. Dinasti merupakan pemerintahan istana yang sangat lemah. Beberapa wilayahnya terpecah menjadi sejumlah faksi kesukuan dan

¹⁸Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid. II, h. 243.

¹⁹Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid. II, h. 243-244.

etnik yang dikepalai oleh tokoh-tokoh suku-lokal mereka.²⁰ Pada masa pemerintahan Muhammad Ali Shah (1907-1909 M), wilayah Persia terbagi tiga. Bagian selatan dikuasai oleh Inggris, bagian Utara dikuasai oleh Rusia, dan daerah perbatasan Turki dikuasai oleh Dinasti Usmaniyah.²¹

Setelah Rusia menarik diri dari wilayah yang didudukinya pada Perang Dunia I, Ahmad Shah ibn Muhammad (1909-1925 M) yang merupakan penguasa terakhir dari Dinasti Qajariah, tidak mampu mempertahankan kekuasaannya. Pada tahun 1921 M, terjadi persaingan di kalangan militer dalam memperebutkan kekuasaan.²² Reza Khan Shah, komandan Brigade Kauzak (pasukan militer Persia), memimpin pasukannya bergerak menuju Teheran. Ia berhasil menguasai wilayah itu dan mendirikan Dinasti Pahlevi (1925-1929 M).²³

Pada awal pemerintahannya, Reza Khan Shah mengumbar janji manis bagi Islam sehingga mendapat dukungan dari pemimpin Syiah. Pada waktu itu, banyak kalangan menganggap bahwa sistem monarki sebagai pelindung terhadap sekularisme total dan ancaman komunis. Namun, setumpuk kebijakan yang dikeluarkannya ternyata merugikan keyakinan dan identitas Islam, misalnya: (1) mengasingkan banyak ulama dan kelompok tradisional, (2) agama Majuzi ditetapkan sebagai agama resmi negara bersama dengan Islam, (3) pemerintah lebih memilih menggunakan nama pra-Islam (Pahlevi) dan lambang pra-Islam (singa dan matahari), (4) melakukan pembaruan hukum dan pendidikan dengan landasan Barat, (5) membatasi dikenakannya pakaian keagamaan dengan melarang cadar dan mewajibkan pakaian Barat untuk pria, serta (6) mengontrol sumbangan-sumbangan keagamaan.²⁴

Pada tahun 1941 M, Inggris memecat Reza Khan Shah dan mengangkat putranya yang masih berumur 22 tahun, Muhammad Reza Shah, sebagai penggantinya. Karena usianya masih muda, maka kedudukannya hanya sebagai simbol, sementara kekuasaan Inggris dan Rusia masih tetap bercokol di wilayah itu.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa

²⁰Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, diterjemahkan oleh Ghifron A. Ma'adi dengan judul *Sejarah Sosial Umat Islam Bagian ketiga* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), h. 31-32.

²¹Ahmad al-'Usairiy, *al-Tarikh al-Islamiy*, diterjemahkan oleh Samson Rahman dengan judul *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, h. 440.

²²Ahmad al-'Usairiy, *al-Tarikh al-Islamiy*, diterjemahkan oleh Samson Rahman dengan judul *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, h. 440.

²³John L. Esposito dan John O. Voll, *Islam and Democracy*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dengan judul *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h. 68.

²⁴John L. Esposito dan John O. Voll, *Islam and Democracy*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dengan judul *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, h. 69.

²⁵Edward Mortimer, *Faith and Power: The Politics of Islam*, diterjemahkan oleh Enna Hadi dan Rahmani Astuti dengan judul *Islam dan kekuasaan*, h. 293.

dalam dasawarsa pertama pemerintahan raja muda itu, lebih tepat disebut sebagai pihak yang bertahan daripada pihak yang berkuasa.

Di tengah arena politik yang lebih terbuka tersebut, menciptakan peluang bagi sejumlah kekuatan politik untuk berjuang meraih kekuasaan. Aktivitas-aktivitas politik Islam pun bermunculan pada saat itu. Misalnya, aktivitas yang dipimpin oleh Ayatullah khashyani yang menyerukan pencabutan undang-undang sekular dan pelaksanaan hukum Islam. Kelompok lain yang muncul adalah Fadaiyan-I Islam, sebuah kelompok teroris yang secara dogmatis terikat pada Islam Fundamentalis. Selain itu, tampil pula Front Nasional di bawah pimpinan Mohammad Mussadeq yang menentang rezim Shah.²⁶

Akibat dari tekanan yang bertubi-tubi dari berbagai kelompok yang menentang pemerintah, pada tahun 1953 M, Muhammad Reza Shah lari ke pengasingan di Roma. Namun, dalam waktu enam hari, dia kembali ke Iran atas bantuan Inggris dan Amerika Serikat. Pada dasawarsa inilah ditandai dengan ketergantungan pemerintah yang semakin besar kepada barat.²⁷

Pada tahun 1963 M, Ayatullah Ruhullah Khomeini, pemimpin kelompok radikal dari kalangan ulama, tampil menentang berbagai kebijakan rezim Shah, terutama ketergantungan kepada Amerika. Ia menegaskan bahwa Amerika merupakan musuh Iran, sebab negara itu memberi dukungan kepada Israel. Akibat kecemanya terhadap pemerintah dalam khutbahnya di pesantren yang ada di Qum, mengakibatkan polisi rahasia (SAVAK) menyerang pesantren itu. Dalam serangan yang terjadi pada tanggal 4 juni 1963 M itu, beberapa santri terbunuh dan Khomeini pun ditangkap dan dimasukkan dalam penjara.²⁸

Setelah itu, Shah berusaha meredakan suasana dengan menawarkan perbaikan-perbaikan lebih lanjut. Pada bulan Agustus, Khomeini dibebaskan dan merencanakan pemilihan umum pada bulan Oktober. Namun, Khomeini menyerukan kepada masyarakat luas agar memboikot pemilihan umum itu. Akibatnya, ia ditangkap untuk kedua kalinya dan dimasukkan ke dalam penjara hingga bulan Mei 1964 M. Setelah keluar dari penjara, ia diasingkan ke Turki. Pada tahun 1965 M, Khomeini pindah ke Najaf, Irak.²⁹

²⁶John L. Esposito dan John O. Voll, *Islam and Democracy*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dengan judul *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, h. 73.

²⁷John L. Esposito dan John O. Voll, *Islam and Democracy*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dengan judul *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, h.74.

²⁸Edward Mortimer, *Faith and Power: The Politics of Islam*, diterjemahkan oleh Enna Hadi dan Rahmani Astuti dengan judul *Islam dan kekuasaan*, h. 300-301.

²⁹Edward Mortimer, *Faith and Power: The Politics of Islam*, diterjemahkan oleh Enna Hadi dan Rahmani Astuti dengan judul *Islam dan kekuasaan*, h. 301. Menurut John L. Esposito, Khomeini dikeluarkan dari penjara untuk dieksekusi, namun akibat campur tangan para ulama yang menentang eksekusi itu akhirnya Khomeini diasingkan ke Turki dan kemudian dipindahkan ke Irak, tempat dia tinggal selama 14 tahun. Lihat John L. Esposito dan John O. Voll, *Islam and Democracy*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dengan judul *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, h. 333.

Selama 14 tahun meninggalkan Iran, akhirnya pada tanggal 1 Februari 1979 M, setelah berumur 77 tahun, Khomeini turun dari tangga pesawat yang telah membawanya dari Paris, Prancis. Secara perlahan dia berjalan dalam iring-iringan kendaraan bermotor dari bandara Teheran menuju ke ibu kota. Di sepanjang jalan yang dilaluinya, dijejali sekitar tiga juta warga Iran yang bersuka ria menyambut kedatangannya.³⁰

Pada tanggal 23 oktober 1979 M, Muhammad Reza Shah berangkat ke Amerika Serikat untuk perawatan medis akibat penyakit kanker. Tatkala Amerika Serikat bersiap-siap mengembalikan Shah ke tahta kekuasaannya, pada tanggal 4 November 1979 M, para mahasiswa menduduki kedutaan besar AS di Teheran dan menyandera sebagian besar diplomatnya.³¹ Untuk melanjutkan warisan kerajaan Shah, diangkat Shapour Bakhtiar sebagai pemerintah sementara. Bersamaan dengan itu, kubu Khomeini melantik Mehdi Bazargan sebagai perdana menteri. Akibatnya, terjadi dualisme pemerintahan. Untuk mengatasi itu, dilakukan jajak pendapat untuk mendirikan sebuah pemerintahan baru. Keputusannya, 98 % rakyat Iran mendukung gagasan Khomeini untuk membentuk Republik Islam Iran.³² Hal ini membuktikan bahwa Khomeini berpengaruh di Iran.

Dalam rentang tahun 1979-1981, dunia menyaksikan pembentukan dan pelembagaan Republik Islam Iran. Khomeini dengan revolusinya tampil mewujudkan komponen legitimasi Republik Islam. Syi'ah Imam Dua Belas ditetapkan sebagai agama negara. Agama, nasionalisme, konstitusionalisme, dan legitimasi tetap merupakan realitas-realitas yang saling terkait dalam periode pascarevolusi.³³

Menurut L. Carl Brown, keberhasilan Khomeini menggulingkan Dinasti Pahlevi, disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, dukungan dari para ulama yang pada saat diremehkan kemampuannya oleh elit sekuler. *Kedua*, kuatnya perasaan seluruh masyarakat Iran yang telah dimanipulasi oleh rezim Shah dengan kekuatan asing, untuk mempersiapkan landasan bagi perpaduan nasionalisme anti asing, tradisionalisme, dan sentiment agama. Agama dan nasionalisme segera menyatu dalam sebuah Iran Syi'ah menghadapi para tetangga non-muslim dan kaum Sunni. Bahkan, para buruh dan petani yang tergabung dalam partai Tudeh (Komunis), dengan mudah terpengaruh oleh pesan Khomeini yang menggabungkan agama, nasionalisme, dan populisme. *Ketiga*, tulisan-tulisan Ali

³⁰L. Carl Brown, *Religion and State: The Muslim Approach to politik*, diterjemahkan oleh Abdullah Ali dengan judul *Wajah Islam Politik: Pergulatan Agama dan Negara Sepanjang Sejarah Umat* (Cet. I; Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003), h. 244-245.

³¹John L. Esposito dan John O. Voll, *Islam and Democracy*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dengan judul *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, h. 335.

³²“Daftar Tokoh Iran”. Wikipedia bahasa Indonesia. <https://id.m.wikipedia.org> (06 September 2022).

³³John L. Esposito dan John O. Voll, *Islam and Democracy*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dengan judul *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, h. 79.

Syari'ati telah mewarnai pemikiran kaum muda, khususnya mereka yang berpendidikan, untuk mendukung gagasan tentang revolusioner yang dipimpin oleh Khomeini.³⁴

Dengan demikian, revolusi Islam Iran digerakkan oleh kaum ulama atau mullah dan didukung oleh massa sebagai motor penggerak dalam revolusi ini. Di belakang revolusi ini terdapat banyak ulama dan filosof, misalnya Sayyid Muhammad Thabathaba'i, Ayatullah Murtadha Mutahhari³⁵ dan Ali Syari'ati.³⁶ Revolusi ini berhasil menggulingkan rezim otoriter Syah Iran yang memegang kekuasaan monarki Absolut Dinasti Pahlevi. Ketika menjelang revolusi, Khomeini dipandang oleh rakyat Iran sebagai pigur yang diharapkan dapat membawa perubahan-perubahan dalam negeri Iran yang saat itu sangat kental dengan nuansa sekularisasi maupun westernisasi yang dilakukan oleh Syah Iran.

D. Pro-Kontra Sistem Politik *Velayat-e Faqih*

Pada bulan Maret 1979, melalui konsensus nasional, sistem politik Iran diubah dari sistem monarki yang turun-temurun menjadi Republik Islam. Pada bulan Agustus 1979, dewan pakar yang terpilih membuat rancangan undang-undang baru, yang kemudian disetujui oleh pakar politik lain pada bulan November 1980.³⁷

Undang-undang baru ini menggambarkan pandangan-pandangan khomeini tentang sifat pemerintahan dan kepemimpinan masyarakat muslim yang didasarkan pada konsep *velayat-e faqih*, suatu konsep perwalian oleh pemimpin keagamaan tertinggi. Konsep ini berakar pada teori Syi'ah Itsna 'Asyariyah tentang legitimasi politik dan konsep imamah. Menurut teori ini, Ali ibn Abi Thalib dan keturunannya dari pernikahannya dengan Fathimah merupakan wali yang sebenarnya dari agama Islam, sekaligus pemimpin

³⁴L. Carl Brown, *Religion and State: The Muslim Approach to politik*, diterjemahkan oleh Abdullah Ali dengan judul *Wajah Islam Politik: Pergulatan Agama dan Negara Sepanjang Sejarah Umat*, h. 245-246.

³⁵Murtadha Mutahhari adalah salah satu pemimpin revolusi Islam Iran, beliau adalah Guru Besar Filsafat Islam di Universitas Teheran yang paling berpengaruh dan sangat populer karena polemis-polemis agamis yang menentang budaya Iran. Lihat Hamid inayat, *Modern Islamic Political Thought, the Response of Syi'i and Sunni Muslim to the Twentieth Century*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Asep Hikmah dengan judul *Reaksi Politik Sunnah dan Syi'ah, Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke XX* (Cet. I; Bandung: Pustaka, 1988), h. 191.

³⁶Ali Syari'ati adalah eksponen Modernisme Syi'ah paling terkenal, bersama sejumlah guru agama dan muballigh, mereka mendirikan pusat pendidikan dan dakwah yang disebut Husayniyyah al-Irsyad di Teheran sebuah pusat pengkajian Islam yang benar. Ia sering pula disebut dengan 'Bapak Idiologi Revolusi Iran' julukan ini berkaitan dengan peran dan keterlibatan secara aktif dalam bermacam perubahan yang dialami oleh masyarakat Iran dalam hal ekonomi, etika, budaya puisi, prosa, film, jurnalistik dan agama. Lihat Hamid inayat, *Modern Islamic Political Thought, the Response of Syi'i and Sunni Muslim to the Twentieth Century*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Asep Hikmah dengan judul *Reaksi Politik Sunnah dan Syi'ah, Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke XX*, h. 191. Bandingkan dengan Ali Syari'ati, *an Islamic Utopian: A. Political Biography of Ali Syari'ati* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Dien Wahid dkk dengan judul *Ali Syari'ati, Biografi, Politik Intelektual Revolusioner* (Indonesia: Erlangga, 2002), h. iii.

³⁷Shireen T. Hunter, *The Politics of Islamic Revivalism: Diversity and Unity*, diterjemahkan oleh Ajat Sudrajat dengan judul *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan* (Cet. I; Yogyakarta; PT Tiara Wacana Yogya, 2001), h. 277.

politik dan spritual umat Islam yang sah.³⁸ Selama para imam hidup di antara kaum Syi'ah, mereka mengarahkan kesetiaan terhadap otoritas kekuasaan. Ketika putra laki-laki yang masih bayi dari imam kesebelas hilang pada abad ke-9, komunitas kaum Syi'ah memasuki masa penantian. Selama paruh pertama dari periode ini (kegaiban *sughra*), ada empat orang wakil yang melakukan komunikasi langsung dengan imam yang tersembunyi (*al-Imam al-Muntazhar*), menjadi penunjuk jalan bagi kaum Syi'ah. Namun, wakil yang terakhir meninggal tanpa mengangkat penggantinya, sehingga kaum Syi'ah memasuki *kegaiban kubra*, yang akan berlangsung hingga kembalinya imam yang tersembunyi sebagai *al-Mahdi*.³⁹

Dalam konteks politik Khomeini, kedaulatan menjadi milik Tuhan dan semua hukum yang diperlukan diberikan dalam syariah. Kewajiban rakyat adalah menerapkan dan hidup dalam hukum-hukum Tuhan. Oleh karena itu, yang pantas memerintah adalah orang-orang yang memahami hukum-hukum Tuhan. Selama dalam kurun kegaiban iman, orang-orang itulah yang menjadi ulama. Ulama berfungsi sebagai wali, penafsir, sekaligus pelaksana hukum-hukum Tuhan. Semua organ pemerintahan, termasuk lembaga kepresidenan, hanya merupakan pelaksana hukum syariah yang sesuai dengan hasil penafsiran faqih yang tertinggi. Berdasar dari sinilah sehingga sebagian besar posisi penting dalam pemerintahan, termasuk presiden, harus dijabat oleh ulama. Meski dalam hal ini, parlemen tidak dapat membuat undang-undang, tetapi dapat merumuskan program-program konstitusi, yang dilengkapi dengan 12 orang anggota dewan *velayat* untuk memastikan bahwa undang-undang itu sesuai dengan syariah.⁴⁰

Dalam wilayah al-Faqih, menurut khomeini ada 4 prinsip dasar yang harus ditegakkan, yaitu:

Pertama, Allah swt. adalah hakim mutlak bagi seluruh alam semesta dan segala isinya. Allah adalah penguasa tunggal bagi umat Islam dan Dialah pemilik kedaulatan yang sah. *Kedua*, Kepemimpinan manusia (*qiyadah Basyariyyah*) yang mewujudkan

³⁸Urutan nama-nama imam Syi'ah Itsna' 'Asyariyah: (1) Ali ibn Abi Thalib, (2) Hasan ibn Ali, (3) Husain ibn Ali, (4) Ali ibn Husain, (5) Muhammad ibn Ali, (6) Jafar ibn Muhammad, (7) Musa ibn Ja'far, (8) Ali ibn Musa, (9) Muhammad ibn Ali, (10) Ali ibn Muhammad, (11) Hasan ibn Muhammad, (12) Muhammad ibn Hasan. Lihat A. Rahman Zainuddin dan M. Hamdan Basyr (ed), *Syi'ah dan Politik di Indonesia: Sebuah Penelitian* (Cet. I; Bandung; Mizan, 2000), h. 54.

³⁹Shireen T. Hunter, *The Politics of Islamic Revivalism: Diversity and Unity*, diterjemahkan oleh Ajat Sudrajat dengan judul *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan* h. 277-278. Dari segi etimologi, kata al-Mahdi adalah isim maf'ul dari kata *huda-yahdi*, yang berarti orang yang diberi petunjuk dari Allah. Dalam terminologi kaum Syi'ah, al-Mahdi adalah tokoh laki-laki dari ahl al-bait yang akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan agama dan keadilan yang akan diikuti oleh umat Islam. Tokoh ini akan membantu Isa al-Masih yang turun ke dunia untuk membunuh dajjal. Bagi kelompok Syi'ah Itsna' 'Asyariyah, tokoh tersebut adalah Muhammad ibn Hasan yang menghilang ketika masih bayi, yang hingga sekarang sedang ditunggu kemunculannya. Lihat Muslih Fathoni, *Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 13-14.

⁴⁰Muslih Fathoni, *Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 280-281.

kepemimpinan Allah swt. di muka bumi ini adalah kenabian dengan peraturan Allah swt. yang disampaikan kepada umat manusia melalui para Nabi. *Ketiga*, Garis Imamah menunjukkan garis kelanjutan dari para nabi dalam memimpin umat. Untuk melanjutkan kepemimpinan Ilahiyyah diperlukan adanya manusia-manusia suci yang faqih tentang syari'at Islam dan mewarisi perjuangan Nabi atau Rasulullah saw. dan *ahlu al-Bayt-nya*⁴¹ (keluarga rasul saw.) *Keempat*, Pada saat Imam dalam keadaan ghaib besar, kepemimpinan nubuwwah dilanjutkan oleh para *faqih*. *Fuqaha* adalah pengganti para imam. Pada mereka dipercayakan kepemimpinan (*wilayat*) atas umat.⁴²

Dengan demikian, dalam wilayah al-faqih Allah swt. adalah Pencipta dan hakim mutlak yang mengatur alam semesta dan segala isinya. Allah juga memilih manusia di muka bumi ini sebagai khalifah untuk keselamatan manusia dan yang berhak menjadi khalifah adalah orang-orang yang memiliki unsur-unsur kepribadian yang murni serta luhur secara fitrah. Untuk itu, yang berhak memimpin umat adalah para Nabi, para Imam, dan para Fuqaha. Karena para *anbiya'* sudah berlalu dan *aulya'* atau Imam sedang ghaib. Maka sekarang umat berada pada periode kepemimpinan para fuqaha atau faqih.

Meski konsep politik khomeini berhasil diterapkan, namun ternyata mendapat tantangan dari berbagai pihak. Abdolkarim Soroush, seorang pemikir Islam moderat, misalnya, memiliki gagasan tentang pemisahan agama dari politik (*worldly power*). Ia menentang dijadikannya Islam sebagai ideologi negara. Dengan gagasannya yang memekakkan telinga kelompok konservatif itu, ia digelari oleh Barat sebagai "Luther Islam". Seperti halnya Luther di Jerman yang menggugat otoritas tunggal para Bapa gereja, Soroush menggedor *velayat-e faqih* yang memberi wewenang tunggal kepada ulama. Baginya, skandal pemberian wewenang itu tak ubahnya meniru sejarah kalam gereja di abad pertengahan.⁴³

Thabathaba'i Qami, ulama Syi'ah yang tinggal di Najaf (Irak), juga menentang konsep *velayat-e faqih* dan keterlibatan ulama dalam politik praktis. Menurutnya, sejak kegaiban imam terakhir, dunia Islam tidak memiliki pemimpin yang sah dan adil hingga kembalinya sang imam tersebut. Pemerintahan *velayat-e faqih* versi Khomeini adalah kualitas keadilan dan legitimasi yang bertentangan dengan teori dasar Syi'ah.

⁴¹Menurut paham Syi'ah ada dua belas imam yang ma'sum atau terjaga dari kesalahan dan dosa setelah Nabi Muhammad saw. meninggal dunia. Imam Keduabelas sekarang dalam keadaan ghaib besar. Suatu saat nanti akan hadir kembali sebagai Imam Mahdi al-Muntadzar.

⁴²Vilayat atau Wilayah menurut pandangan Syi'ah adalah pemerintahan atau pengaturan serta pelaksanaan hukum. Wilayah ini bukanlah suatu keistimewaan, melainkan merupakan tugas yang sangat berat dalam menunjukkan kesetiaan kepada Nabi Muhammad saw. melalui para Imam, khususnya Imam Keduabelas dalam memerintah. Untuk jelasnya dapat di lihat dalam Ayatullah Ali Mishkini, *Wali Faqih: Ulama Pewaris Kenabian* (Jakarta: Risalah Masa, 1991), h. 44.

⁴³Diakses dari; <http://panimbang.blogspot.com/Iran-negeri-perlawanan.html>. (22 November 2009). Lihat juga Adi Bunardi, "Pola Pemikiran Filsafat Politik Abdolkarim Soroush" *Jakarta: Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sandra*. <https://journal.sandra.ac.id>. (08 September 2022)

Thabathaba'i dan mullah lain yang menolak konsep Khomeini, merasa takut dengan keterlibatan para ulama dalam kegiatan politik, sebab mereka akan dijadikan sebagai subyek penelitian dan kemarahan publik jika gagal dalam misinya. Dalam keadaan demikian, akan merusak wibawa ulama, bahkan kemungkinan akan mengakibatkan serangan balik yang anti ulama.⁴⁴

E. Transformasi Sosial-Budaya di Iran Pascarevolusi

Sejak berdirinya Republik Islam Iran, sistem peradilan yang dianut berdasarkan syariah. Pada instansi kejaksaan, semua jaksa dan penuntut umum terdiri dari para ulama. Sedangkan pada instansi kementerian hukum, hakim-hakim keagamaan ditetapkan sebagai pemimpin para hakim umum dalam setiap pemeriksaan perkara, untuk memastikan kesesuaian seluruh keputusan yang ditetapkannya dengan syariah.⁴⁵

Dalam bidang pendidikan, semua buku-buku pelajaran ditulis ulang. Sejarah Iran ditafsirkan kembali sesuai dengan konsep revolusi. Pelajaran di sekolah dasar dan menengah dititikberatkan pada bidang keagamaan dan bahasa Arab. Bahkan, pada tahun 1980, dibentuk tujuh anggota Dewan Revolusi Kebudayaan yang bertugas sebagai badan pembuat keputusan tentang sistem pendidikan tinggi. Para mahasiswa yang akan memasuki universitas, diuji dan disaring berdasarkan sikap mereka terhadap revolusi serta pengetahuan mereka tentang sejarah dan ilmu keislaman. Tujuan dari semua ini adalah untuk menciptakan masyarakat dan pemerintahan yang Islami, sekaligus membentuk pribadi muslim dan muslimah yang sejati.⁴⁶

Dalam bidang penyiaran radio dan televisi, program-program siaran ditekankan pada pembahasan-pembahasan dan tema-tema keagamaan sebagai prioritas utama. Musik dan lagu-lagu yang ditayangkan, harus bernuansa patriotik militer yang memuji para syuhada Iran dalam perang melawan Irak.⁴⁷

Dalam bidang seni puisi, seni lukis, dan seni perfilman, subyek dan temanya ditekankan pada aspek revolusi dan keagamaan. Dalam hal ini, ditetapkan bahwa tidak dibenarkan adanya bentuk seni mendorong perilaku korup dan anti Islam. Semua bentuk seni mencerminkan tujuan-tujuan revolusi. Itulah sebabnya sehingga karya Umar Khayam dan Firdausi yang tema khususnya ingin menghidupkan kembali bahasa persia

⁴⁴Shireen T. Hunter, *The Politics of Islamic Revivalism: Diversity and Unity*, diterjemahkan oleh Ajat Sudrajat dengan judul *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan*, h. 282.

⁴⁵Shireen T. Hunter, *The Politics of Islamic Revivalism: Diversity and Unity*, diterjemahkan oleh Ajat Sudrajat dengan judul *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan*, h. 282.

⁴⁶Shireen T. Hunter, *The Politics of Islamic Revivalism: Diversity and Unity*, diterjemahkan oleh Ajat Sudrajat dengan judul *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan*, h. 282.

⁴⁷Shireen T. Hunter, *The Politics of Islamic Revivalism: Diversity and Unity*, diterjemahkan oleh Ajat Sudrajat dengan judul *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan*, h. 282.

dan sejarah Iran selama tiga abad dominasi Arab, tidak mendapat tempat atau diremehkan.⁴⁸

Pemerintah Iran pernah mencoba mengubah nama-nama bulan pra-Islam dalam kalender matahari Iran dan secara aktif ingin menghilangkan perayaan *now ruz* (tahun baru Iran pra-Islam). Bahkan, pernah melakukan kampanye menentang pemakaian nama-nama Iran non-Islam. Namun, dengan adanya reaksi rakyat dan terjadinya peran melawan Irak, memaksa pemerintah menerima kebudayaan dan simbol-simbol nasionalis untuk mendukung kepentingan perangnya. Akibatnya, kalender tidak diubah dan pemerintah sendiri merayakan *now ruz*.⁴⁹

Meski diakui bahwa di satu sisi pemerintah Iran berusaha menerapkan syariat Islam, namun di sisi lain warga masyarakatnya banyak yang melarat akibat tekanan dunia internasional yang sangat kuat. Catatan terakhir menunjukkan bahwa angka kecelakaan lalu-lintas sangat tinggi, sehingga diperkirakan satu orang meninggal dalam tiap 26 menit. Selain itu, tingkat populasi sangat parah. Bahkan, tingkat kecanduan narkoba naik tajam, yakni sekitar dua juta kaum muda Iran tercatat pengguna narkoba. Tercatat pula sekitar 1,7 juta wanita Iran adalah tunawisma, sehingga tidak mengherankan jika angka pekerja seks komersil mencapai 300.000 orang. Angka kawin kontrak (*sigeh*) pula meningkat, hingga mencapai 122 % pada tahun 2007.⁵⁰

F. Pemerintahan dan Politik di Iran

Iran adalah salah satu negara yang mempunyai sistem politik yang berdasarkan konstitusi yang dinamai dengan "Qanun-e Asasi".⁵¹ Di antara struktur tersebut adalah:

1. Pemimpin Agung

Pemimpin Agung Iran bertanggung jawab terhadap "kebijakan-kebijakan umum Republik Islam Iran". Ia juga merupakan ketua pasukan bersenjata dan badan intelijen Iran dan mempunyai kuasa mutlak untuk menyatakan perang. Ketua kehakiman, stasiun radio dan rangkaian televisi, ketua polisi dan tentara dan enam dari dua belas anggota Majelis Wali Iran juga dilantik oleh Pemimpin Agung. Majelis Ahli bertanggung jawab memilih dan juga memecat Pemimpin Agung atas justifikasi kelayakan dan popularitas individu itu. Majelis ini juga bertanggung jawab memantau tugas Pemimpin Agung.

⁴⁸Shireen T. Hunter, *The Politics of Islamic Revivalism: Diversity and Unity*, diterjemahkan oleh Ajat Sudrajat dengan judul *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan*, h. 284-285.

⁴⁹Shireen T. Hunter, *The Politics of Islamic Revivalism: Diversity and Unity*, diterjemahkan oleh Ajat Sudrajat dengan judul *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan*, h. 285.

⁵⁰Diakses dari: <http://panimbang.blogspot.com/Iran-negeri-perlawanan.html> (22 November 2009)

⁵¹Diakses dari: <http://Iran.dari.Wikipedia.bahasa.Indonesia,ensiklopedia.Bebas.html> (07 September 2022)

2. Eksekutif

Orang kedua terpenting dalam Republik Islam Iran adalah Presiden. Setiap Presiden dipilih melalui pemilihan umum dan akan memerintah Iran selama empat tahun. Setiap calon presiden mesti mendapat persetujuan dari Majelis Wali Iran sebelum pemilu dilaksanakan agar mereka 'serasi' dengan gagasan negara Islam. Tanggung jawab presiden adalah memastikan konstitusi negara diikuti dan juga mempraktikkan kekuasaan eksekutif. Tetapi presiden tidak berkuasa atas perkara-perkara yang di bawah kekuasaan Pemimpin Agung.

Presiden melantik dan mengepalai Kabinet Iran, dan berkuasa membuat keputusan mengenai administrasi negara. Terdapat delapan wakil presiden dan dua puluh satu menteri yang ikut serta membantu presiden dalam administrasi, dan mereka semua mesti mendapat persetujuan badan perundangan. Tidak seperti negara-negara lain, cabang eksekutif tidak memiliki kekuasaan dalam pasukan bersenjata, tetapi presiden Iran berkuasa melantik Menteri Pertahanan dan Intelijen dan harus mendapat persetujuan Pemimpin Agung dan badan perundangan.

a. Majelis Wali

Majlis Wali Iran mempunyai dua belas ahli undang-undang, dan enam dari mereka dilantik oleh Pemimpin Agung. Ketua Kehakiman akan mencadangkan enam anggota selebihnya dan mereka akan dilantik secara resmi oleh parlemen Iran atau Majles. Majelis ini akan menafsirkan konstitusi dan mempunyai hak veto untuk keputusan dan keanggotaan parlemen Iran. Jikalau terdapat undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum syariah, maka akan dirujuk kembali oleh parlemen.

b. Majelis Kebijaksanaan

Majelis Kebijaksanaan berkuasa untuk menyelesaikan konflik antara parlemen dengan Majelis Wali Iran. Badan ini juga turut menjadi penasihat Pemimpin Agung.

c. Parlemen

Majles-e Shura-ye Eslami (Majlis Perundingan Islam) mempunyai 290 anggota yang dilantik dan akan bertugas selama empat tahun. Semua calon Majles dan ahli undang-undang dari parlemen haruslah mendapat persetujuan Majelis Wali.

d. Kehakiman

Pemimpin Agung akan melantik ketua kehakiman Iran, dan ia pula akan melantik Mahkamah Agung dan juga ketua penuntut umum. Terdapat beberapa jenis mahkamah di Iran termasuk mahkamah umum yang bertanggung jawab atas kasus-kasus umum dan kejahatan. Terdapat juga "Mahkamah Revolusi" yang mengadili beberapa kasus tertentu termasuk isu mengenai keselamatan negara.

e. Majelis Ahli

Majelis Ahli yang bermusyawarah selama seminggu setiap tahun mempunyai 86 anggota yang ahli dalam ilmu-ilmu agama. Mereka diundi secara umum dan akan bertugas selama delapan tahun. Majelis ini akan menentukan kelayakan calon-calon

presiden dan anggota parlemen. Majelis ini juga akan mengundi untuk jabatan Pemimpin Agung dan juga berkuasa untuk memecatnya.

f. Dewan Kota Setempat

Majelis setempat akan dipilih secara umum untuk bertugas selama empat tahun di semua kota dan desa. Kekuasaan majelis ini luas, dari melantik pimpinan kota hingga menjaga kepercayaan rakyat.

G. Iran pada masa Mahmoud Ahmadinejad

Mahmoud Ahmadinejad adalah Presiden Iran yang keenam. Jabatan kepresidenannya dimulai pada 3 Agustus 2005.⁵² Ketika terpilih sebagai presiden ia termasuk salah seorang yang hidup sederhana sebagaimana digambarkan oleh penyiar.⁵³ Hal ini dapat diperhatikan ketika pertama kali menduduki kantor kepresidenan. Ia dikenal secara luas sebagai seorang tokoh konservatif yang loyal terhadap nilai-nilai Revolusi Islam di Iran.⁵⁴ Ia menyumbangkan seluruh karpet Istana Iran yang sangat tinggi nilainya itu kepada masjid-masjid di Teheran dan menggantikannya dengan karpet biasa yang mudah dibersihkan. Ia mengamati bahwa ada ruangan yang sangat besar untuk menerima dan menghormati tamu VIP, lalu ia memerintahkan untuk menutup ruang tersebut dan menanyakan pada protokoler untuk menggantinya dengan ruangan biasa dengan 2 kursi kayu, meski sederhana tetap terlihat impresive.

Di banyak kesempatan ia bercengkerama dengan petugas kebersihan di sekitar rumah dan kantor kepresidenannya. Satu hal yang membuat kagum staf kepresidenan adalah tas yg selalu dibawa sang presiden tiap hari selalu berisikan sarapan; roti isi atau roti keju yang disiapkan istrinya dan memakannya dengan gembira, ia juga menghentikan kebiasaan menyediakan makanan yang dikhususkan untuk presiden. Saat harus menginap di hotel, ia meminta diberikan kamar tanpa tempat tidur yg tidak terlalu besar karena ia tidak suka tidur di atas kasur, tetapi lebih suka tidur di lantai beralaskan karpet dan selimut.

Ketika dituduh oleh Amerika Serikat untuk melakukan tes nuklir. Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dalam wawancaranya dengan jaringan televisi ABC News, membantah laporan dokumen yang menyebutkan pihaknya berencana untuk melakukan tes terhadap alat pemicu nuklir. Dia bahkan menilai kritikan terhadap program nuklir Iran, telah berubah menjadi lelucon yang tidak lucu yang secara terus menerus diulang. Seperti dikutip BBC tanggal 22 Desember 2009.⁵⁵

⁵²Lihat [carelbeltsanda-WordPress](https://carelbeltsanda.wordpress.com), "[Mahmuoud Ahmadinejad](#)", <https://carelbeltsanda.wordpress.com> (08 September 2022)

⁵³<http://www.kesederhanaanpresideniranmahmudahmadinejad.html> (08 September 2022)

⁵⁴Diakses dari: <http://iran.dari.wikipedia.bahasa.indonesia.ensiklopedia.bebas.html> (10 September 2022)

⁵⁵Tribun Timur, *Ahmadinejad: Amerika Rekayasa Tes Nuklir Iran* (23 Desember 2009), h. 5

Sebelumnya, majalah *times* mengaku telah menemukan dokumen yang dibuat pada 2007. dalam dokumen itu disebutkan rencana untuk melakukan tes pemicu nuklir berbahan uranium deuterida dalam empat tahun. Benda tersebut dapat digunakan sebagai inisiator neutron, sebuah komponen dari bom nuklir yang memicu ledakan.

Atas tuduhan *Times* tersebut, Presiden Ahmadinejad kembali menyatakan tidak ada bom nuklir di negaranya. Dia menegaskan jika teknologi nuklir negaranya digunakan untuk kepentingan masyarakat, yaitu pembangkit listrik.⁵⁶ Pemerintah Teheran sudah berulang kali menegaskan bahwa program nuklirnya adalah semata-mata untuk tujuan damai. Pengayaan uranium hanya sekedar untuk pembangkit tenaga nuklir bukan untuk senjata nuklir.

III. SIMPULAN

1. Islam masuk ke Iran pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn al-Khattab. Peristiwa masuknya tersebut melalui berbagai pertempuran, seperti perang Namariq, Jisr, dan Buwaih yang terjadi pada tahun 634 M. Setelah itu, disusul perang Qadisiyah pada tahun 635 M, Madain pada tahun 641. Dengan takluknya seluruh wilayah Kerajaan Persia ke tangan kaum muslimin, maka masyarakat Persia yang semula menganut agama Zoroaster, beralih menganut agama Islam.
2. Islam, dengan ciri khas mazhab Syi'ah, sangat berpengaruh dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Iran. Sejak berdirinya Kerajaan Safawiyah, mazhab Syi'ah Itsna' 'Asyariah ditetapkan sebagai agama resmi negara. Bahkan, sejak terjadinya perubahan politik dari sistem monarki ke republik, Ayatullah Ruhullah Khomeini menerapkan konsep politik *velayat-e faqih*. Konsep politik ini berimplementasi pada penetapan ulama sebagai pemimpin tertinggi negara, sekaligus menjadikan syariat Islam sebagai pemandu terhadap semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di Iran.
3. Sejak berdirinya Republik Islam Iran, sistem peradilan yang dianut adalah berdasarkan dengan hukum islam atau syariah. Instansi kejaksaan misalnya, semua jaksa dan penuntut umum terdiri dari para ulama. Sedangkan pada instansi kementerian hukum, hakim-hakim keagamaan ditetapkan sebagai pemimpin para hakim umum dalam setiap pemeriksaan perkara. Untuk memastikan kesesuaian seluruh keputusan yang ditetapkan dengan syariah, baik yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penyiaran radio dan televisi, seni puisi, dan seni lukis, subyek dan temanya ditekankan pada aspek revolusi dan keagamaan.

⁵⁶Tribun Timur, *Ahmadinejad: Amerika Rekayasa Tes Nuklir Iran* (23 Desember 2009), h. 5

IV. DAFTAR PUSTAKA

- al-'Usairiy, Ahmad, *al-Tarikh al-Islamiy*, diterjemahkan oleh Samson Rahman dengan judul *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, Cet. IV; Jakarta: Akbar Eka Saran, 2006.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post Modernisme*, Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996.
- Brown, L. Carl, *Religion and State: The Muslim Approach to politik*, diterjemahkan oleh Abdullah Ali dengan judul *Wajah Islam Politik: Pergulatan Agama dan Negara Sepanjang Sejarah Umat*, Cet. I; Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Bunardi, Adi, "Pola Pemikiran Filsafat Politik Abdolkarim Soroush" *Jakarta: Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sandra*. <https://journal.sandra.ac.id>. (08 September 2022)
- carelbeltsanda-WordPress, "[Mahmuoud Ahmadinejad](#)", <https://carelbeltsanda.wordpress.com>. (08 September 2022)
- "Daftar Tokoh Iran". Wikipedia bahasa Indonesia, <https://id.m.wikipedia.org> (06 September 2022)
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid. II, Cet. IX; Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Eksposite, John, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, Cet. II; Bandung: Mizan, 2002.
- Esposito, John L. dan John O. Voll, *Islam and Democracy*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dengan judul *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, Cet. I; Bandung: Mizan, 1999.
- , John L. (ed), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, diterjemahkan oleh Eva YN, et all., *Ensiklopedi-Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid II, Cet. II; Bandung: Mizan, 2002
- Fathoni, Muslih, *Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam: Ringkas*, Cet. III; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- <http://Iran dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia Bebas>. Html. (07 September 2022)
- <http://panimbang.blogspot.com.Iran-negeri-perlawanan.html>. (22 November 2009).
- <http://www>. *Kesederhanaan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad*. Html. (08 September 2022)

- Hunter, Shireen T., *The Politics of Islamic Revivalism: Diversity and Unity*, diterjemahkan oleh Ajat Sudrajat dengan judul *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan*, Cet. I; Yogyakarta; PT Tiara Wacana Yogya, 2001.
- Inayat, Hamid, *Modern Islamic Political Thought, the Response of Syi'i and Sunni Muslim to the Twentieth Century*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Asep Hikmah dengan judul *Reaksi Politik Sunnah dan Syi'ah, Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke XX*, Cet. I; Bandung: Pustaka, 1988.
- Lapidus, Ira M., *A History of Islamic Societies*, diterjemahkan oleh Ghifron A. Ma'adi dengan judul *Sejarah Sosial Umat Islam: Bagian I & II*, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- , Ira M., *A History of Islamic Societies*, diterjemahkan oleh Ghifron A. Ma'adi dengan judul *Sejarah Sosial Umat Islam Bagian ketiga*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990.
- Mishkini, Ayatullah Ali, *Wali Faqih: Ulama Pewaris Kenabian*, Jakarta: Risalah Masa, 1991.
- Mortimer, Edward, *Faith and Power: The Politics of Islam*, diterjemahkan oleh Enna Hadi dan Rahmani Astuti dengan judul *Islam dan kekuasaan*, Cet. I; Bandung: Mizan, 1984.
- Syari'ati, Ali, *an Islamic Utopian: A Political Biography of Ali Syari'ati* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Dien Wahid dkk dengan judul *Ali Syari'ati, Biografi, Politik Intelektual Revolusioner*, Indonesia: Erlangga, 2002.
- Tribun Timur, *Ahmadinejad: Amerika Rekayasa Tes Nuklir Iran*. (23 Desember 2009), h. 5
- Zainuddin, A. Rahman dan M. Hamdan Basyr (ed), *Syi'ah dan Politik di Indonesia: Sebuah Penelitian*, Cet. I; Bandung; Mizan, 2000.